

## **BAB 1 Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan inklusi di Indonesia saat ini terus didorong sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan hak belajar yang setara bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Komitmen tersebut secara resmi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yang melarang adanya diskriminasi akses pendidikan. Menurut Hanifah et al. (2021), sistem ini idealnya menjadi wadah pembelajaran publik di mana siswa dengan maupun tanpa disabilitas dapat belajar dan bersosialisasi secara bersamaan. Lebih lanjut, Debora et al. (2025) menegaskan bahwa tujuan utama inklusi adalah memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Implementasi kebijakan ini pun terlihat semakin masif secara nasional, terbukti dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) per Desember 2023 yang mencatat 40.164 satuan pendidikan formal terdapat siswa berkebutuhan khusus.

Meskipun kebijakan inklusi telah meluas secara nasional, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadirkan permasalahan umum yang penuh tantangan, khususnya di wilayah pedesaan. Walaupun idealnya sebuah sekolah inklusi diwajibkan memiliki kesiapan dari aspek sumber daya manusia, sarana, dan kebijakan (Farah et al., 2022), adanya desakan administratif dari dinas wilayah setempat memaksa sekolah dasar reguler menjadi opsi satu-satunya meski ketiadaan instrumen identifikasi siswa yang memadai (Hanifah et al., 2021). Kesenjangan antara pedoman ideal dan realitas ini didukung oleh berbagai temuan penelitian sebelumnya. Salsabila dan Rachman (2025) menemukan bahwa jika sekolah di perkotaan lebih banyak terkendala isu koordinasi kebijakan, sekolah di pedesaan justru menghadapi persoalan struktural berupa ketiadaan fasilitas aksesibel dan ketidaktersediaan sumber daya manusia. Terkait tantangan struktural tersebut, Debora et al. (2025) mencatat bahwa banyak guru belum memiliki keterampilan pedagogis yang cukup sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Beban ini bertambah dengan ketiadaan tenaga ahli pendamping, sebagaimana diungkapkan oleh Rusyda dan Hamdan (2025) bahwa posisi Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah negeri sering tidak mendapat pengakuan honorarium, sehingga tugas pendampingan dibebankan sepenuhnya kepada wali kelas reguler. Sebagai dampak dari minimnya dukungan sistemik ini, Wardany dan Ulfa (2022) menemukan bahwa 50% guru rintisan inklusi yang belum pernah menerima

pelatihan mengalami kecemasan yang tinggi terkait inkompetensi pedagogis dan ketidakmampuan meredam perilaku maladaptif siswa.

Permasalahan inklusi secara umum tersebut tervalidasi secara nyata melalui hasil temuan studi awal di lingkungan sekolah dasar pedesaan yang menjadi wilayah penelitian ini. Berdasarkan data dari laman resmi referensi.data.kemendikdasmen.go.id, tercatat terdapat 67.862 ABK pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia, dengan 7.030 anak berada di Jawa Barat dan 86 anak terdata di Kabupaten Subang. Banyaknya jumlah siswa ABK tersebut menuntut kesiapan sekolah secara menyeluruh, namun kenyataannya para guru di desa sering kali harus mendidik tanpa bekal kompetensi khusus. Hal ini terkonfirmasi dari wawancara awal dengan wali kelas inklusi di salah satu sekolah dasar pedesaan di Subang, yang secara nyata mengungkapkan hambatannya di kelas: *"Saya tidak mendapatkan pelatihan, dan ibaratnya diterjunkan begitu saja. Saya setiap hari terus belajar mengembangkan metode saya sendiri, trial and error setiap saat."* Kondisi dilematis ini semakin diperparah dengan posisi sekolah yang sering kali terpaksa menyelenggarakan inklusi tanpa persiapan matang akibat ketiadaan alternatif Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mudah diakses oleh orang tua di pedesaan dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Gambaran keterpaksaan ini terucap jelas dari pernyataan subjek yang mengatakan: *"Iya, sekolah juga menerima bukan karena siap siap banget, tapi karena kasian anaknya mau di kemanain kalau ga di terima di sini, masa ga sekolah."*

Lebih lanjut, temuan studi awal terkait kondisi dilematis di lapangan tersebut divalidasi kembali oleh literatur lain yang menyoroti dampak psikologisnya secara lebih luas. Sagimantari et al. (2025) mengklasifikasikan minimnya pelatihan dan beban kerja yang berat ini sebagai hambatan pedagogis utama. Dampak dari masalah ini sejalan dengan laporan UNICEF (2023) yang menunjukkan bahwa guru di berbagai negara menghadapi tekanan psikologis yang tinggi akibat meningkatnya beban kerja inklusi. Di Indonesia, hasil Survei PGRI (2022) mencatat 63% guru merasa kewalahan mengelola kelas inklusi, dan 40% di antaranya mengalami burnout (kelelahan ekstrem), yang juga didukung oleh data Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud di mana 56% guru melaporkan peningkatan beban kerja harian. Mengenai fenomena ini, Rusyda dan Hamdan (2025) menjelaskan bahwa *burnout* dapat menurunkan efikasi dan identitas profesional pendidik akibat bekerja dalam lingkungan yang terus menuntut energi tanpa dukungan psikologis yang memadai. Rangkaian hambatan struktural tersebut mengarah pada satu persoalan krusial yang secara eksplisit menjadi masalah utama dalam penelitian ini, yakni tingginya beban dan kerentanan psikologis wali

kelas sekolah dasar di pedesaan akibat penyelenggaraan pendidikan inklusi yang tidak diimbangi dengan kompetensi maupun dukungan sistemik.

Untuk dapat bertahan dan menjalankan tugas secara efektif di tengah lingkungan yang menekan, pendidik memerlukan ketekunan dan dorongan jangka panjang yang dalam psikologi dikonseptualisasikan sebagai *grit*. Duckworth et al. (2007) mendefinisikan *grit* sebagai kombinasi antara ketekunan usaha (*perseverance of effort*) dan konsistensi minat (*consistency of interest*) terhadap tujuan jangka panjang, di mana individu tetap mempertahankan usahanya terlepas dari berbagai kegagalan maupun keterbatasan fasilitas. Peran penting *grit* bagi seorang pendidik dibuktikan secara empiris oleh Ferawati dan Purba (2024), yang menemukan bahwa *grit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan dedikasi serta kinerja profesional guru. Dalam konteks guru inklusi, Muhibbin dan Suryanto (2020) menjelaskan bahwa konstruksi *grit* pada guru terbangun dari *passion* dan kepedulian sosial, yang memungkinkan mereka memandang hambatan sebagai tantangan serta meresponsnya melalui pencarian dukungan sejawat dan pemecahan masalah.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pendidikan inklusi umumnya lebih banyak membahas faktor eksternal, seperti kesiapan kebijakan administratif maupun kelengkapan fasilitas fisik sekolah (Salsabila & Rachman, 2025). Sementara itu, penelitian yang secara spesifik membahas konsep *grit* pada guru mayoritas baru dilakukan pada lingkungan sekolah menengah di daerah perkotaan yang fasilitasnya sudah memadai (Ferawati & Purba, 2024). Selain itu, kajian mengenai dedikasi guru dalam mendidik anak disabilitas juga masih terfokus pada profesi Guru Pendamping Khusus (*shadow teacher*) yang memang ditugaskan secara khusus untuk mendampingi satu siswa (Muhibbin & Suryanto, 2020). Ketiga kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji dinamika *grit* pada wali kelas inklusi di pedesaan, padahal mereka memikul beban ganda untuk mendidik siswa reguler sekaligus anak berkebutuhan khusus secara mandiri di tengah keterbatasan.

Belum adanya literatur yang secara khusus membahas kondisi psikologis tersebut menjadi landasan utama bagi pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini penting untuk memahami dinamika dorongan internal guru wali kelas inklusi di pedesaan yang harus menjalankan tugas tanpa dukungan tenaga ahli di tengah berbagai keterbatasan sistemik. Oleh karena itu, fokus penelitian dirancang untuk menggali secara mendalam bagaimana wali kelas inklusi di sekolah dasar pedesaan memaknai pengalaman *grit* mereka. Pemahaman ini sangat diperlukan untuk menganalisis proses refleksi pendidik saat menghadapi hambatan situasional di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi cara

guru menerapkan *perseverance of effort* dan *consistency of interest* demi mempertahankan komitmen profesional mereka dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada eksplorasi pengalaman wali kelas inklusi di sekolah dasar pedesaan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Peneliti menitikberatkan pada proses bagaimana subjek memahami dan memaknai pengalaman tersebut sehingga tetap memiliki *grit* untuk mempertahankan komitmen mengajar. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana wali kelas inklusi di sekolah dasar pedesaan memaknai pengalaman *grit* mereka dalam menghadapi tantangan tugas serta menjaga komitmen mengajar?

### **Tujuan Penelitian**

**Tujuan umum.** Mengeksplorasi dan memahami secara mendalam proses pemaknaan pengalaman *grit* pada wali kelas inklusi di sekolah dasar pedesaan, terutama dalam menyikapi hambatan tugas dan mempertahankan motivasi mengajar.

**Tujuan khusus.** Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggali bagaimana wali kelas inklusi memaknai ketekunan usaha (*perseverance of effort*) yang mereka terapkan dalam menghadapi hambatan situasional serta keterbatasan fasilitas di pedesaan.
2. Memahami proses pemaknaan terhadap konsistensi minat (*consistency of interest*) yang mendasari keputusan guru untuk mempertahankan peran sebagai pendidik inklusi dalam jangka panjang.
3. Mengidentifikasi strategi internal yang muncul dari cara guru memaknai tantangan mengajar di lingkungan sekolah dasar pedesaan yang minim dukungan tenaga ahli.

### **Kegunaan Penelitian**

**Kegunaan teoritis.** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur psikologi, khususnya terkait dengan konsep *grit* (*perseverance of effort* dan *consistency of interest*) sebagai sumber daya psikologis pendidik. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi referensi empiris mengenai bagaimana *grit* dipahami dan dimaknai oleh guru dalam konteks sosial pedesaan yang memiliki karakteristik dan keterbatasan struktural tersendiri, sehingga melengkapi literatur pendidikan inklusi yang selama ini lebih didominasi oleh konteks perkotaan

**Kegunaan Praktis.** Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

1. Bagi Guru. Penelitian ini dapat menjadi instrumen refleksi diri bagi pendidik untuk mengenali dinamika *grit* di dalam diri mereka. Dengan memahami cara memaknai tantangan tugas, guru dapat mengidentifikasi strategi *coping* yang adaptif guna mencegah kelelahan mental (*burnout*), serta menjaga motivasi untuk terus memberikan pengajaran yang optimal bagi siswa reguler maupun anak berkebutuhan khusus (ABK).
2. Bagi Pihak Sekolah. Temuan penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai beban psikologis yang ditanggung oleh wali kelas inklusi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, sekolah dapat menggunakan hasil ini sebagai dasar untuk membangun lingkungan kerja yang lebih suportif, misalnya dengan memfasilitasi kelompok diskusi sejawat antar guru (*peer support system*) atau mengevaluasi distribusi beban kerja agar wali kelas tidak merasa berjuang sendirian dalam menangani kelas inklusi.
3. Bagi Pemerintah dan Dinas Pendidikan. Penelitian ini dapat dijadikan landasan evaluasi berbasis data empiris terkait kebijakan pendidikan inklusi di daerah pedesaan. Pemerintah dapat merancang langkah intervensi yang aplikatif, seperti menyediakan program dukungan psikososial berkala bagi guru, mengadakan pelatihan pedagogis penanganan ABK yang lebih praktikal (bukan sekadar teoritis), serta mengkaji urgensi pengadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah dasar negeri pedesaan.